

***FRIENDLY CREDIT INNOVATION: A PERSPECTIVE ANALYSIS FROM THE  
NEO-WEBERIAN STATE***

***INOVASI KREDIT MESRA: SEBUAH ANALISIS PERSPEKTIF DARI NEO-  
WEBERIAN STATE***

**Devi Surya Pratama<sup>1\*</sup>, Bintoro Wardiyanto<sup>2</sup>, Erna Setijanigrum<sup>3</sup>**

Universitas Airlangga<sup>1,2,3</sup>  
[devisuryapratama@gmail.com](mailto:devisuryapratama@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The MESRA Credit Program (Masyarakat Ekonomi Sejahtera), implemented by the Provincial Government of West Java, is a public service innovation that applies the principles of the neo-Weberian state to promote inclusive economic development. This study aims to analyze the role of MESRA Credit as a policy instrument that reflects the characteristics of the neo-Weberian state, such as the state's role as an active facilitator, an orientation toward efficiency and effectiveness, and the application of modern management in program governance. Through a qualitative approach and document analysis, this study found that MESRA Credit has contributed to improving capital accessibility for MSMEs and underprivileged communities by leveraging strategic collaboration between the government, financial institutions, and networks of places of worship. However, the study also identifies several challenges, such as the need to strengthen accountability mechanisms, enhance public participation, and develop synergies with other economic empowerment programs. To optimize the impact of MESRA Credit, this study recommends a series of improvements, including strengthening governance, expanding partnerships, enhancing institutional capacity, and developing a more conducive regulatory framework. The findings and recommendations of this study are expected to contribute to the theoretical discourse on the application of the neo-Weberian state in the Indonesian context and provide practical insights for developing more effective and sustainable inclusive financing programs.*

**Keywords:** *Neo-weberian State, Public Service Innovation, Mesra Credit, Micro, Small And Medium Enterprises.*

**ABSTRAK**

Program Kredit MESRA (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan inovasi layanan publik yang menerapkan prinsip-prinsip *neo-weberian state* dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kredit MESRA sebagai instrumen kebijakan yang merefleksikan karakteristik *neo-weberian state*, seperti peran negara sebagai fasilitator aktif, orientasi pada efisiensi dan efektivitas, serta penerapan manajemen modern dalam tata kelola program. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, studi ini menemukan bahwa Kredit MESRA telah berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas permodalan bagi UMKM dan masyarakat prasejahtera, dengan memanfaatkan kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga keuangan, dan jaringan rumah ibadah. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kebutuhan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan sinergi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Untuk mengoptimalkan dampak Kredit MESRA, penelitian ini merekomendasikan serangkaian penyempurnaan yang meliputi penguatan tata kelola, perluasan kemitraan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan kerangka regulasi yang lebih kondusif. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan wacana teoritis tentang penerapan *neo-weberian state* dalam konteks Indonesia, serta memberikan masukan praktis bagi pengembangan program pembiayaan inklusif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Neo-weberian State, Inovasi Layanan Publik, Kredit Mesra, Usaha Mikro Kecil Menengah.*

**PENDAHULUAN**

Bisakah negara menghadirkan solusi keuangan inklusif yang mendukung pemberdayaan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas

dan transparansi? Ketika pasar tidak selalu mampu menjawab kebutuhan masyarakat, peran negara yang kuat dan inovatif menjadi solusi utama melalui pendekatan *Neo-Weberian State*. *Neo-*

*weberian state* atau yang disingkat dengan NWS adalah konsep dalam teori administrasi publik yang merupakan evolusi dari model birokrasi tradisional yang dikembangkan oleh Max Weber. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap *new public management* dan mencoba menggabungkan unsur-unsur terbaik dari birokrasi tradisional dengan kebutuhan modernisasi pemerintahan. *Neo-weberian state* mengintegrasikan elemen-elemen hirarki, pasar, dan jaringan dalam ruang tata kelolanya. Pendekatan hibrida ini dapat menciptakan sistem tata kelola yang lebih seimbang dan mudah beradaptasi, yang dapat merespons tantangan dan peluang ekonomi secara lebih efektif (Kuhlmann, 2024).

Birokrasi yang efektif yang diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip Weberian sangat penting untuk pembangunan ekonomi (Ang, 2017). Prinsip-prinsip ini mencakup rekrutmen yang meritokratis, keahlian teknis yang memadai, dan pemisahan yang jelas antara jabatan publik dan keuntungan pribadi. Dalam model birokrasi Weberian, individu dipilih untuk posisi tertentu berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka, bukan karena koneksi pribadi atau favoritisme. Keahlian teknis juga ditekankan, dengan pegawai negeri yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan peran mereka. Selain itu, ada perbedaan yang jelas antara tugas resmi seorang pejabat publik dan kepentingan pribadi mereka, untuk mencegah korupsi dan nepotisme. Pendekatan *neo-weberian state* terhadap kebijakan publik, termasuk dalam bidang ekonomi, inovasi, dan

pembangunan daerah, bertujuan untuk mereformasi struktur negara dan mekanisme manajemen publik agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan lebih baik (Białynicki-Birula et al., 2017). *Neo-weberian state* berupaya menggabungkan kekuatan dari model birokrasi Weberian tradisional dengan penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kontemporer. Hal ini melibatkan modernisasi sistem administrasi publik, peningkatan efisiensi, dan peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, *neo-weberian state* memandang peran negara bukan sekadar sebagai regulator pasif, tetapi sebagai fasilitator aktif yang strategis. Negara diharapkan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan pengembangan sektor swasta.

Program Kredit MESRA (Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat sebagai contoh penerapan konsep *neo-weberian state* dalam konteks Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Konsep *neo-weberian state* menekankan peran negara yang aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi, namun dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern dan orientasi pada efisiensi dan efektivitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 52,96% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat menghadapi kendala permodalan<sup>1</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pembiayaan merupakan tantangan yang signifikan bagi UMKM

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik. (2017). Potensi Usaha Mikro Kecil Jawa Barat.

untuk dapat tumbuh dan berkembang. Keterbatasan akses permodalan ini menghambat potensi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan berkontribusi pada perekonomian daerah. UMKM memiliki peran yang vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2018, UMKM menyumbang 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja<sup>2</sup>. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi, salah satunya akibat kendala permodalan yang dihadapi oleh UMKM.

Program Kredit MESRA hadir sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi permasalahan ini. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap permodalan. Dengan memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan mikro, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga memiliki dimensi keimanan, di mana sasaran utamanya adalah jemaah dan masyarakat di sekitar rumah ibadah yang memiliki usaha mikro atau yang akan menjalankan usaha mikro namun belum bankable, terutama untuk masyarakat prasejahtera.

Penyediaan pembiayaan publik seperti Kredit MESRA selaras dengan praktik di negara-negara lain yang menggunakan kekuatan moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi. Pinjaman publik sering kali digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar, yang sangat

penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Cina, misalnya, telah secara efektif menggunakan kekuatan moneter yang berdaulat untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan produksi industri, yang secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat (Liang et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi negara melalui penyediaan pembiayaan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Kredit MESRA mencerminkan beberapa prinsip kunci dari konsep *neo-weberian state*. Pertama, program ini menunjukkan peran aktif negara dalam mendorong pembangunan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga secara proaktif menyediakan pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Kedua, program ini berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Dengan menargetkan masyarakat yang memiliki usaha mikro namun belum bankable, Kredit MESRA berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik untuk mencapai dampak yang maksimal. Ketiga, program ini menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti penilaian kelayakan usaha dan pendampingan teknis, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha yang dibiayai.

### **Kerangka Konseptual**

Konsep *neo-weberian state* merupakan perkembangan dari model birokrasi tradisional yang dirumuskan oleh Max Weber. Konsep ini muncul sebagai tanggapan atas kritik terhadap paradigma *new public management* (NPM) dan *new public governance*

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan UKM. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil,*

*Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018.*

(NPG), dengan tujuan untuk mengintegrasikan kelebihan-kelebihan birokrasi tradisional dengan tuntutan modernisasi tata kelola pemerintahan. Model neo-weberian state menghadirkan struktur hierarki yang tertata dengan baik dan dilandasi oleh supremasi hukum serta proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gaus et al. (2017), reformasi birokrasi di Indonesia telah mengadopsi berbagai teknik dan teknologi yang umumnya digunakan oleh sektor korporasi untuk mengukur produktivitas dan kinerja aparatur negara. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep NPM sebagaimana diajukan oleh Hood (1991). NPM sendiri merupakan suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, meskipun reformasi birokrasi di Indonesia telah mengadopsi beberapa prinsip NPM, bukan berarti seluruh ideologi NPM diterapkan secara penuh. Hal ini mengingat kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia yang masih belum stabil pasca transisi dari era Orde Baru yang otoriter menuju sistem demokrasi. Dalam situasi seperti ini, negara masih perlu berperan sebagai arsitek utama dalam mengarahkan jalannya reformasi birokrasi melalui kehadiran birokrasi yang solid dan hukum administrasi yang demokratis. Peran negara ini penting untuk menyediakan aturan, formalitas, standar etika, dan hukum yang kuat sebagai landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penegasan kembali peran aparatur negara menjadi langkah fundamental dalam mengubah perilaku

masyarakat yang sebelumnya bersifat patrimonial sebagai akibat dari praktik birokrasi di era Orde Baru, menuju masyarakat yang lebih demokratis. Perubahan pola pikir kultural ini harus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak serta merta ditinggalkan begitu saja, namun tetap dipertahankan dengan melakukan modernisasi dan penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman.

Praktik *neo weberian state* kemudian diterapkan sebagai upaya untuk menjadikan birokrasi tradisional ala Weber menjadi lebih profesional, efisien, dan ramah terhadap warga, sebagaimana diargumentasikan oleh Pollit & Bouckaert (2011). Dalam perspektif *neo weberian state*, negara tetap dianggap sebagai fasilitator utama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat globalisasi, perubahan teknologi, demografi, dan lingkungan (Pollit, Bouckaert, & Löffler, 2004). Keterlibatan negara melalui birokrasi yang kuat menjadi tulang punggung dalam menyukseskan reformasi di Indonesia, sekaligus mengimbangi masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat.

Peran sentral negara dalam mendesain dan menata reformasi birokrasi di Indonesia tertuang secara jelas dalam “Buku Pedoman Grand Design Reformasi Birokrasi” yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2010-2014. Buku pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terarah dan terukur. Hadirnya buku pedoman ini menunjukkan bahwa konsep negara Weberian tidak serta

merta ditinggalkan, namun justru dilestarikan dan dimodernisasi menuju konsep negara neo-Weberian. Dalam proses ini, peran dan fungsi demokrasi perwakilan tetap dipertahankan, tanpa perlu mengalami perubahan secara radikal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia menerapkan perpaduan antara prinsip-prinsip NPM dengan konsep *neo weberian state*. Di satu sisi, berbagai teknik dan teknologi korporasi diadopsi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur negara. Namun di sisi lain, peran sentral negara tetap dipertahankan untuk mengarahkan jalannya reformasi birokrasi melalui kehadiran birokrasi yang kuat dan hukum administrasi yang demokratis. Kombinasi ini diharapkan dapat menghasilkan birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa harus mengorbankan peran dan fungsi demokrasi perwakilan.

Menurut Wolfgang Drechsler (2009) serta Christopher Pollitt & Bouckaert (2017), ahli reformasi administrasi publik, perspektif *neo-weberian* yang khas Eropa tentang organisasi birokrasi berpijak pada pemikiran Max Weber, meskipun tidak sepenuhnya identik. Perspektif ini mengandung setidaknya empat prinsip utama.

1. Pertama, sentralitas negara, yang memastikan bahwa negara-negara yang lemah sekalipun memiliki kapasitas politik, organisasional, dan manajerial untuk menghadapi tantangan domestik dan global, seperti globalisasi, ancaman lingkungan, perubahan demografi, dan inovasi teknologi.
2. Kedua, reformasi dan penegakan hukum administrasi, yang menjamin kesetaraan bagi semua individu dan

kelompok di hadapan hukum, melindungi dari tindakan sewenang-wenang dan tidak terduga oleh institusi negara, serta menyediakan pengawasan khusus oleh negara terhadap tindakan-tindakannya sendiri.

3. Ketiga, pelestarian pelayanan publik, yang mempertahankan konsep pelayanan publik dengan status, budaya, serta syarat dan ketentuan kerja yang berbeda. Prinsip ini seringkali terabaikan atau tidak ada di negara-negara pasca-sosialis yang bergabung dengan Uni Eropa, di mana pegawai negeri sipil memiliki gaji dan tingkat pendidikan yang rendah, serta rentan terhadap penurunan pangkat dan pemecatan oleh otoritas politik.
4. Keempat, demokrasi perwakilan, yang menjadi landasan bagi legitimasi, pengendalian, serta pemeliharaan stabilitas dan kompetensi birokrasi publik. Prinsip ini, yang merupakan inti dari perhatian Weber terhadap kontrol parlemen atas birokrasi, membedakan Eropa Barat dari Rusia dan Uni Soviet di masa lalu. Di Rusia dan Uni Soviet, birokrasi tidak stabil, tidak dapat diandalkan, tidak efisien, dan “tidak birokratis” (dalam pengertian Weber) karena tidak mampu mempertahankan netralitasnya dalam menghadapi kontrol politik eksternal (Bendix, 1989).

Komponen-komponen yang diajukan dalam konsep *neo-weberian state* bertujuan untuk menghasilkan sinergi fungsional antara penyediaan layanan rutin yang terjamin dan inklusif, penanganan yang efektif terhadap permasalahan tata kelola pemerintahan yang kronis, serta inovasi yang berkelanjutan. Kombinasi ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan

kepercayaan publik terhadap negara, melebihi model-model alternatif seperti NPM dan NPG.

Merujuk pada diskusi Drechsler (2005) tentang *neo-weberian state*, terdapat prinsip-prinsip baru yang tidak hanya melampaui birokrasi Weberian, tetapi juga mengadopsi beberapa aspek dari NPM. Pertama, orientasi eksternal terhadap warga negara, yang menekankan pergeseran fokus dari aturan internal birokrasi ke arah kebutuhan, nilai, dan peluang yang dirasakan oleh masyarakat. Prinsip ini serupa dengan “orientasi konsumen” dalam NPM, yang terutama didasarkan pada budaya profesional tentang kualitas dan pelayanan, serta penerapan mekanisme pasar dalam beberapa kasus yang sesuai. Kedua, konsultasi publik tambahan dan keterlibatan warga negara secara langsung, yang melengkapi, namun tidak menggantikan demokrasi perwakilan. Prinsip ini menyediakan beragam prosedur untuk melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi dan representasi pandangan mereka secara langsung, mirip dengan kontrol warga dan masyarakat dalam NPM. Ketiga, orientasi pada hasil, yang mendorong fokus yang lebih besar pada pencapaian hasil, tidak hanya sekadar mengikuti prosedur formal secara konsisten. Prinsip ini hampir serupa dengan NPM, di mana orientasi hasil bekerja baik secara *ex post* maupun *ex ante*, dengan mengintegrasikan pemantauan dan evaluasi serta jenis perkiraan khusus yang dilakukan melalui prosedur *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

Penelitian yang dilakukan oleh Peters (2010) dalam bukunya “American Public Policy” menunjukkan bahwa model *neo-weberian state* mampu menciptakan ekosistem kelembagaan yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan daya saing ekonomi. Peters

berpendapat bahwa kerangka kerja *neo-weberian state* menyediakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian mekanisme kelembagaan. Hal ini dicapai melalui penerapan mekanisme tata kelola yang transparan, sistem merit dalam rekrutmen pegawai negeri, dan kemampuan adaptasi birokrasi terhadap perubahan dinamis lingkungan ekonomi global. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya membantu membangun kepercayaan publik dan menarik investasi. Sistem merit memastikan bahwa individu yang paling berkualitas dan kompeten dipilih untuk posisi kunci dalam birokrasi, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan lembaga publik. Kemampuan birokrasi untuk beradaptasi dengan perubahan memungkinkannya untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan yang berkembang dari masyarakat dan ekonomi.

Menurut Pollitt dan Bouckaert (2004) dalam buku mereka “Public Management Reform: A Comparative Analysis,” *neo-weberian state* mengkombinasikan elemen-elemen positif dari birokrasi Weberian klasik dengan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada hasil. Pendekatan ini menekankan pentingnya kapasitas institusional negara yang kuat, profesionalisme birokrasi, dan orientasi pelayanan publik yang efisien sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pollitt dan Bouckaert berpendapat bahwa *neo-weberian state* berupaya menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dan prediktabilitas yang ditawarkan oleh birokrasi Weberian dengan fleksibilitas dan inovasi yang diperlukan dalam konteks modern. Dengan membangun kapasitas kelembagaan yang kuat, *neo-weberian state* menciptakan lingkungan yang

stabil dan dapat diprediksi bagi aktivitas ekonomi. Profesionalisme birokrasi, yang dicirikan oleh kompetensi teknis, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap pelayanan publik, memastikan bahwa lembaga-lembaga publik berfungsi secara efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan ekonomi. Orientasi pada pelayanan publik yang efisien membantu mengurangi hambatan birokrasi dan mempromosikan lingkungan yang ramah bisnis.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan konsep *neo-weberian state* dalam program Kredit MESRA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang komprehensif, mencakup dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi akademik yang relevan. Sumber data utama meliputi Buku Pedoman Grand Design Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta informasi program yang tersedia di situs web resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka konseptual *neo-weberian state* yang dikembangkan oleh Pollitt dan Bouckaert (2011). Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana karakteristik *neo-weberian state*, seperti peran negara yang aktif, orientasi pada efisiensi dan efektivitas, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen modern, tercermin dalam desain dan implementasi program Kredit MESRA. Temuan dari analisis ini kemudian

diinterpretasikan dan dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan dampak program Kredit MESRA dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip *neo-weberian state* dalam inovasi layanan publik di Indonesia.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Kredit MESRA merupakan sebuah terobosan inovatif program kredit berkelanjutan yang dirancang secara komprehensif tanpa beban bunga dan persyaratan agunan melalui kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan berbagai institusi keuangan dan perbankan. Program visioner ini memiliki multiaspek tujuan yang sangat fundamental, yakni secara sistematis meningkatkan aksesibilitas ekonomi masyarakat terhadap sumber permodalan, memberikan kemudahan akses pembiayaan mikro kepada kelompok ekonomi lemah, signifikan mengurangi angka pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan dimensi spiritual dan keimanan. Fenomena sosial fundamental yang melatarbelakangi program ini adalah kondisi struktural masyarakat di wilayah-wilayah marginal yang sangat terbatas akses pembiayaannya, sehingga rentan terhadap praktik rentenir eksploitatif yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran kemiskinan berkepanjangan. Secara ingenius, program Kredit MESRA memilih rumah ibadah sebagai sentra distribusi dan sosialisasi, yang tidak hanya bertujuan

mempermudah akses masyarakat, melainkan juga secara simultan mengintegrasikan misi peningkatan keimanan dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kesatuan pendekatan holistik.

Program Kredit MESRA memiliki *grand design* strategis yang komprehensif dengan target mulia mencapai beberapa indikator pembangunan inklusif, yakni: pertama, secara signifikan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya beli masyarakat Jawa Barat; kedua, berkontribusi aktif mewujudkan *Target Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 10 tentang pengurangan kesenjangan; ketiga, mengupayakan aksesibilitas sektor finansial bagi minimal 80% warga Jawa Barat; dan keempat, meningkatkan indeks pembangunan inklusif melalui optimalisasi rasio rekening Dana Pihak Ketiga (DPK). Pencapaian implementatif program hingga saat ini sungguh menggembirakan, dengan realisasi konkret meliputi: total 2.066 warga telah menerima manfaat langsung, total kredit yang berhasil disalurkan mencapai 5,37 miliar rupiah, serta telah melibatkan 129 rumah ibadah dan komunitas keagamaan sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan<sup>3</sup>. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, *neo weberian state* mendukung intervensi negara yang memperhatikan pembangunan sosial-ekonomi berbasis komunitas, sambil tetap menjaga akuntabilitas dan efisiensi layanan.

Hubungan antara *neo-weberian state* dan inovasi program pemerintah seperti Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa perspektif.

1. Pertama, program Kredit MESRA mencerminkan peran negara sebagai fasilitator aktif dalam pembangunan ekonomi, yang merupakan salah satu prinsip inti dari *neo-weberian state*. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara proaktif menyediakan akses ke pembiayaan bagi masyarakat ekonomi lemah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Ini menunjukkan pergeseran dari peran negara yang pasif menjadi mitra aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. *Neo-weberian state* menekankan pada pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan (*customer-oriented*). Kredit MESRA dirancang untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM, dengan persyaratan yang lebih sederhana dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional. *Neo-weberian state* menekankan pada pencapaian tujuan dan dampak yang terukur, berbeda dengan birokrasi *Weberian* yang lebih fokus pada prosedur dan aturan. Dalam konteks Kredit MESRA, orientasi ini mendorong program untuk menetapkan target yang jelas, seperti jumlah UMKM yang terbantu, nilai kredit yang disalurkan, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat dan publikasi terkait Kredit MESRA seringkali memuat data statistik mengenai pencapaian program, yang menunjukkan adanya fokus pada pengukuran kinerja<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (n.d.). Program Kredit MESRA Masyarakat Ekonomi Sejahtera Jawa Barat. Diakses pada 19 Desember, dari

<http://lkpj.jabarprov.go.id/post/program-kredit-mesra-masyarakat-ekonomi-sejahtera-jawa-barat>

2. Kedua, inovasi program seperti Kredit MESRA menggambarkan kemampuan adaptasi birokrasi terhadap perubahan dinamis lingkungan ekonomi, yang juga merupakan aspek penting dari *neo-weberian state*. Dengan merancang program yang secara khusus menargetkan kebutuhan masyarakat ekonomi sejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan responsivitas terhadap tantangan ekonomi kontemporer dan komitmen untuk menyesuaikan intervensi kebijakan agar sesuai dengan realitas di lapangan. *Neo-weberian state* menekankan pada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Dalam konteks Kredit MESRA, hal ini penting untuk memastikan bahwa dana disalurkan secara tepat sasaran dan efektif, serta mencegah terjadinya penyimpangan<sup>4</sup>. Meskipun informasi detail dari lembaga yang beraitan mengenai mekanisme akuntabilitas Kredit MESRA ini perlu dikaji lebih lanjut, kerjasama dengan lembaga keuangan yang teregulasi dan audit eksternal dapat menjadi bagian dari mekanisme tersebut.
3. Ketiga, keberhasilan program Kredit MESRA bergantung pada kapasitas institusional yang kuat dan profesionalisme birokrasi, yang merupakan prinsip-prinsip inti dari *neo-weberian state*. Pelaksanaan program yang efektif memerlukan sistem tata kelola yang transparan, sumber daya manusia yang kompeten, dan mekanisme pemantauan yang memadai. Dalam konteks *neo-weberian state*, lembaga-lembaga publik yang terlibat dalam program ini perlu menunjukkan tingkat profesionalisme dan efisiensi yang tinggi untuk memastikan dampak positif yang diharapkan. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan inovasi Kredit MESRA, *neo-weberian state* menekankan pada peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dikelola dengan baik dan efektif (Wilson, 2019).
4. Kolaborasi dengan Bank BJB menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan kemitraan strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya internal, sesuai dengan konsep *neo-weberian state* (McMullin, 2021). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan perannya sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan formal tetap dapat memperoleh pembiayaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *neo-weberian state*, di mana negara tetap memegang kendali dalam pengaturan layanan publik, tetapi melibatkan aktor non-negara untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan. Kerja sama dengan Bank BJB memperlihatkan bagaimana prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, yang menjadi inti dari *neo-weberian state*, diterapkan dalam inovasi Kredit MESRA. Bank BJB menyediakan infrastruktur perbankan dan mekanisme kredit yang sesuai, sementara pemerintah bertindak sebagai pengarah kebijakan dan pemberi jaminan sosial agar risiko kredit tetap terkendali. Kolaborasi ini memungkinkan pencapaian hasil yang tidak hanya

<sup>4</sup> Development. Public Management Service. (1995). *Governance in transition: Public*

*management reforms in OECD countries.* OECD Publishing.

mendukung kesejahteraan masyarakat melalui akses kredit berbunga rendah, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui pengelolaan keuangan yang terukur. Dalam hal ini, negara memastikan layanan publik yang inovatif tetap selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Penekatan kolaboratif ini juga mencerminkan peran penting negara dalam menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara sektor publik dan privat. Dalam perspektif *neo-weberian state*, kolaborasi semacam ini memungkinkan negara untuk tetap menjadi aktor utama dalam mengarahkan inovasi pelayanan publik, sambil memanfaatkan keahlian dan sumber daya mitra swasta seperti Bank BJB. Hasilnya adalah pelayanan publik yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar tata kelola *neo-weberian state*. Kredit MESRA pun menjadi model bagaimana negara dapat memainkan peran proaktif di tengah dinamika modernisasi pelayanan publik.

Dalam perspektif *neo-weberian state*, salah satu kelemahan Kredit MESRA adalah potensi kurangnya keberlanjutan program karena bergantung pada subsidi pemerintah dan kerja sama dengan sektor perbankan, seperti Bank BJB. *neo-weberian state* menekankan perlunya efisiensi dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Namun, jika Kredit MESRA tidak memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang jelas atau bergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran daerah, program ini berisiko menghadapi kendala ketika sumber daya pemerintah terbatas. Hal ini

dapat mengurangi kemampuan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara konsisten dalam jangka panjang. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaan dan pengawasan program. Perspektif *neo-weberian state* menekankan pentingnya partisipasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kredit MESRA, meskipun berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, mungkin belum sepenuhnya melibatkan komunitas lokal dalam evaluasi dan perencanaan program. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara tujuan program dan kebutuhan nyata masyarakat, serta mengurangi transparansi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, *neo-weberian state* juga menuntut integrasi yang lebih luas antara teknologi dan tata kelola untuk memastikan efisiensi. Dalam konteks Kredit MESRA, kurangnya penerapan sistem berbasis digital yang terintegrasi untuk proses pendaftaran, pemantauan, dan evaluasi dapat menjadi hambatan. Ketiadaan teknologi semacam ini dapat memperlambat pelaksanaan program dan membuatnya kurang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan teknologi, Kredit MESRA dapat lebih mudah menjangkau penerima manfaat dan meningkatkan transparansi, yang merupakan elemen penting dalam kerangka *neo-weberian state*.

Akhir kata, keberhasilan jangka panjang dari program Kredit MESRA akan bergantung pada beberapa faktor. Pertama, diperlukan tata kelola yang baik dan transparansi dalam pelaksanaan program untuk memastikan bahwa pembiayaan disalurkan secara tepat sasaran dan efektif. Kedua, perlu ada

sinergi antara Kredit MESRA dengan program-program pemberdayaan UMKM lainnya, seperti pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi akses pasar, untuk mengoptimalkan dampak program. Ketiga, diperlukan evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap program untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan dinamika UMKM di Jawa Barat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sebagai contoh penerapan konsep *neo-weberian state*, program Kredit MESRA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan peran aktif negara dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha mikro yang belum *bankable*. Program ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi kendala permodalan yang dihadapi oleh UMKM, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas, penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan jaringan rumah ibadah sebagai mitra strategis. Melalui Kredit MESRA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan beberapa prinsip utama *neo-weberian state*, seperti peran negara sebagai fasilitator aktif, orientasi pada efisiensi dan efektivitas, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dalam tata kelola program. Kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank BJB juga mencerminkan pendekatan *neo-weberian state* yang mengoptimalkan kemitraan dengan aktor non-negara untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang Kredit MESRA akan bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta sinergi dengan

program-program pemberdayaan UMKM lainnya. Diperlukan pula evaluasi dan penyesuaian berkala untuk memastikan program ini tetap adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi di Jawa Barat.

Saran yang dapat diberikan penulis pada program ini adalah:

1. Memperkuat mekanisme tata kelola dan akuntabilitas program Kredit MESRA, termasuk penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis digital dan terintegrasi, untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas program.
2. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, sesuai dengan prinsip *neo-weberian state* yang menekankan pentingnya konsultasi publik dan representasi langsung dari warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum consultative yang melibatkan perwakilan komunitas penerima manfaat.
3. Mengembangkan sinergi yang lebih kuat antara Kredit MESRA dengan program-program pemberdayaan UMKM lainnya, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan teknis, dan fasilitasi akses pasar. Integrasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan usaha penerima manfaat dan mengoptimalkan dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Memperluas kemitraan strategis dengan berbagai aktor non-pemerintah, termasuk lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan jangkauan layanan,

- dan memobilisasi sumber daya alternatif bagi keberlanjutan program.
5. Secara berkala mengevaluasi dan menyesuaikan desain program Kredit MESRA berdasarkan umpan balik dari penerima manfaat, perubahan kondisi sosial-ekonomi, serta pelajaran yang dipetik dari implementasi program. Pendekatan yang adaptif dan responsif ini selaras dengan prinsip *neo-weberian state* yang menekankan fleksibilitas dan inovasi dalam penyediaan layanan publik.
  6. Mempertimbangkan pengembangan kerangka regulasi yang lebih kondusif bagi pembiayaan inklusif, termasuk penyederhanaan persyaratan administrasi, perlindungan konsumen, dan insentif bagi lembaga keuangan yang terlibat dalam program. Hal ini dapat menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan untuk mendukung UMKM dan masyarakat prasejahtera dalam mengakses permodalan.
  7. Mempromosikan pembelajaran dan berbagi pengetahuan antara Kredit MESRA dengan program-program serupa di tingkat nasional maupun internasional. Pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dapat membantu memperkaya perspektif dan mempercepat inovasi dalam pembiayaan inklusif berbasis *neo-weberian state*.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, program Kredit MESRA diharapkan dapat semakin memperkuat perannya sebagai instrumen kebijakan publik yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat, sekaligus menjadi model bagi penerapan prinsip-prinsip *neo-weberian state* dalam inovasi layanan publik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ang, Y. Y. (2017). Do Weberian bureaucracies lead to markets or vice versa? A coevolutionary approach to development. *States in the developing world*, 280-306.
- Bendix, R. (1989). *Embattled reason: essays on social knowledge* (Vol. 2). Transaction Publishers.
- Białynicki-Birula, P., Głowacki, J., & Klich, J. (2017). Conclusion: The neo-Weberian concept of state and its implications for public management. In *Public Policy and the Neo-Weberian State* (pp. 162-173). Routledge.
- Drechsler, W. (2009). Towards a neo-Weberian European Union? Lisbon agenda and public administration. *Halduskultuur*, 10(1), 6-21.
- Gaus, N., Sultan, S., & Basri, M. (2017). State bureaucracy in Indonesia and its reforms: An overview. *International Journal of Public Administration*, 40(8), 658-669.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. *Public administration*, 69(1), 3-19.
- Kuhlmann, S. (2024). Back to Bureaucracy? The Advent of the Neo-Weberian State in Germany. *Journal of Policy Studies*, 39(2).
- Liang, Y. (2024). Harnessing sovereign money for development finance and solving the debt conundrum: the case of China. In *The Elgar Companion to Modern Money Theory* (pp. 329-341). Edward Elgar Publishing.
- McMullin, C. (2021). Challenging the necessity of New Public Governance: Co-production by third sector organizations under different models of public management. *Public Administration*, 99(1), 5-22.

- Önder, Z., & Özyıldırım, S. (2013). Role of bank credit on local growth: Do politics and crisis matter?. *Journal of Financial Stability*, 9(1), 13-25.
- Peters, B. G. (2018). *American public policy: Promise and performance*. Cq Press.
- Pollitt, C., Bouckaert, G., & Löffler, E. (2004). Quality journeys in the european public sector: from there, to here, to where. In *3rd Quality Conference for Public Administrations in the EU*, Rotterdam.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Continuity and change in public policy and management*. Edward Elgar Publishing.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity*. Oxford university press.
- Wilson, J. Q. (2019). *Bureaucracy: What government agencies do and why they do it*. Hachette UK.